



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR W.21-29.AH.02.09 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR W21- 535 -AH.02.09 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
MASA JABATAN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS MASA JABATAN TAHUN 2023
SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 SE-PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Menteri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
 - c. bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu mengadakan perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21-535 -PW.02.09 Tahun 2022 tentang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat tentang Pemberhentian Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris masa jabatan 2021 sampai dengan tahun 2024 dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu mengubah susunan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR W21- -AH.02.09 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR W21-535-AH.02.09 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS MASA JABATAN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS MASA JABATAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 SE-PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;

KESATU : Memberhentikan Saudara :

1. Dr. HUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Mataram;
2. MUHAMMAD ALI, S.H., M.Kn. sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Mataram;
3. DEDI SAPUTRA, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;
4. KARTINI, S.H. sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Tengah;
5. PURNIAWAL, A.Md.,I.P., S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Timur; dan
6. PUNGKI HANDOYO, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21-535-AH.02.09 Tahun 2022 tentang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat tentang Pemberhentian Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris masa jabatan 2021 sampai dengan tahun 2024 dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KEDUA

- KEDUA** : Mengangkat Saudara :
1. PUNGKI HANDOYO, S.H., M.H. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Mataram.
 2. FIKRI SAID, S.H. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Mataram.
 3. Dr. PAHITTIARTIK, S.H., M.H. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;
 4. JUPRIADI PUTRA, S.H., M.H. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Tengah;
 5. DEDY HARDI PUTRA, S.H., M.H. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Timur;
 6. SELFARIO ADHITYAWAN PIKULUN, S.H., M.H. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.;
- KETIGA** : Mengubah susunan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Mataram, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Tengah, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga susunan nama-nama menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pembinaan, pengawasan perilaku dalam pelaksanaan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- KELIMA** : Masa Jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah sampai dengan tahun 2026 terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Dilandatangani secara elektronik oleh :

ROMI YUDIANTO

NIP 197706261997031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Mataram;
5. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Mataram;
7. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Lombok Barat;
8. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Lombok Utara;
9. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Lombok Tengah;
10. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Lombok Timur;
12. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat; dan
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.21-29.AH.02.09 Tahun 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
SE- PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERIODE TAHUN 2023-2026**

KOTA MATARAM :

1.	I MADE AGUS SUARJAYA, S.H., M.H.	Pemerintah
2.	PUNGKI HANDOYO, S.H., M.H.	Pemerintah
3.	MUHAMAD AMIN IMRAN, S.H.,M.H.	Pemerintah
4.	Dr. H. MUHAJIMIN, S.H., M.Hum.	Akademisi
5.	SYAMSUL HIDAYAT, SH., M.H.	Akademisi
6.	BUDI SUTRISNO, S.H., M.Hum.	Akademisi
7.	FIKRI SAID, S.H.	Notaris
8.	I GEDE SUTAMA, S.H.	Notaris
9.	ZULFAHRI, S.H., M.Kn.	Notaris

KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN KABUPATEN LOMBOK UTARA :

1.	Dr. PAHITTIARTIK, S.H., M.H.	Pemerintah
2.	TOTOK SURYA SAPUTRA, S.H.,M.H.	Pemerintah
3.	SUYANTO EDI WIBOWO, S.H., M.H.	Pemerintah
4.	Dr. H. HIRSANUDDIN, S.H.,M.H.	Akademisi
5.	ARIF RAHMAN, SH., M.Hum.	Akademisi
6.	Dr. ATIN MERIATI ISNAINI, S.H.,M.H.	Akademisi
7.	FITRI SUSANTI, SH.	Notaris
8.	DWI RATNA KURNIASARI, S.H.	Notaris
9.	JURIANTO ARDIANSYAH, S.H.,M.Kn.	Notaris

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1.	TOUFAN ARISANDI, S.H., M.H.	Pemerintah
2.	H. ABDI MANAP, S.H., M.H.	Pemerintah
3.	JUPRIADI PUTRA, S.H., M.H.	Pemerintah
4.	SAHRUDDIN, S.H., M.H.	Akademisi
5.	Prof. Dr. H. ARBA, S.H., M.Hum.	Akademisi
6.	ARI RAHMAD HAKIM BUDIAWAN F., S.H., M.Hum.	Akademisi
7.	SAIFUL BAHRI, SH., M.Kn.	Notaris
8.	H. ZAINUL ISLAM, S.H.	Notaris
9.	RETNO KUSBANDINI, S.H., M.Kn.	Notaris

KABUPATEN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1.	BIAWANSYAH PUTA, S.H.	Pemerintah
2.	DEDY HARDI PUTRA, S.H., M.H.	Pemerintah
3.	PUAN RUSMAYADI, S.H.,M.H.	Pemerintah
4.	JOHAN, S.H.,M.H.	Akademisi
5.	BASRI MULYANI, S.H.,M.H.	Akademisi
6.	HAIRUL MASKUM, S.H.,M.H.	Akademisi
7.	Hj. FANNIYAH, S.H.	Notaris
8.	SYEKH ALKAFF, S.H.	Notaris
9.	HAFSAN HIRWAN, S.H., M.Kn.	Notaris

KABUPATEN SUMBAWA DAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1.	H. ASTO WINTYOSO, S.H.	Pemerintah
2.	M. IMRAN ROSIAWAN, S.H., M.Kn.	Pemerintah
3.	SELFARIO ADHITYAWAN PIKULUN, S.H., M.H.	Pemerintah
4.	Dr. LAHMUDDIN ZUHRI, S.H.,M. Hum.	Akademisi
5.	ENDRA SYAIFUDDIN, S.H.,M.H.	Akademisi
6.	JUNAEDY, S.H.	Akademisi
7.	MAHKAMAH IQBAL PERDANA PUTRA, SH., M.Kn.	Notaris
8.	Drs. JOKO DERPO YUWONO, SH.	Notaris
9.	I GEDE SARWADA, SH.,M.Kn.	Notaris

KABUPATEN DOMPU, KABUPATEN BIMA DAN KOTA BIMA

1.	MUHAMMAD USMAN, S.H.	Pemerintah
2.	AHSANURRAHMAN, S.H., M.H.	Pemerintah
3.	AMAR MA'RUF, S.H.	Pemerintah
4.	Dr. RIDWAN, S.H., M.H.	Akademisi
5.	GUFRAH, S.Sos., M.H.	Akademisi
6.	SYAMSUDDIN, S.H., M.H.	Akademisi
7.	RAHAYU LIANA, S.H.,M.Kn.	Notaris
8.	LILY APRIYANI, S.H.,M.Kn.	Notaris
9.	BAIQ HAYINAH, S.H.	Notaris



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Dimanandatangani secara elektronik oleh

ROMI YUDIANTO
NIP 197706261997031001